



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 04 Balai-balai Telp. (0752) 485395 Fax (0752) 485645

email : dpmptsp@padangpanjang.go.id – website : padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 700.1.1.4/ 15 /TAHUN 2025**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Undang-undang...

6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor 2);
13. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 34 Tahun 2024 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2025-2029.

KESATU

Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA...

KEDUA

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kota Padang Panjang yang memuat rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Kota Padang Panjang.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



Nurasrizal, ST, MT
Pembina Tk. I, IV/b. N.P. 19770829 200501 1 004

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

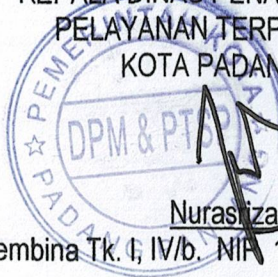
1. Pj. Walikota Padang Panjang.
2. Pj. Sekretaris Daerah Kota Padang Panjang
3. Inspektur Kota Padang Panjang
4. Kepala Bappeda Kota Padang Panjang.
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Arsip.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				dengan kesempatan kerja yang tersedia, sehingga diperlukan indikator yang dapat mengukur peningkatan serapan tenaga kerja sebagai hasil fasilitasi penempatan dan perluasan kesempatan kerja oleh perangkat daerah.	dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang terserap pada tahun sebelumnya.			
4	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Meningkat Produktivitasnya	%	Produktivitas tenaga kerja berpengaruh langsung terhadap daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Masih terdapat tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan produktivitas rendah, sehingga diperlukan indikator untuk mengukur efektivitas program pelatihan kerja, peningkatan kompetensi, dan pembinaan tenaga kerja.	Perbandingan antara jumlah tenaga kerja peserta pelatihan atau pembinaan yang mengalami peningkatan produktivitas kerja dengan jumlah seluruh tenaga kerja peserta pelatihan atau pembinaan dalam periode tertentu.	$\text{Persentase TK Meningkat Produktivitas} = \frac{\text{Jumlah TK yang produktivitasnya meningkat}}{\text{Jumlah TK peserta pelatihan/pembinaan}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Angka	Nilai SAKIP mencerminkan tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Masih diperlukan penguatan perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja agar pelaksanaan program dan kegiatan lebih efektif, efisien, dan berdampak. Oleh karena itu, nilai SAKIP OPD dijadikan indikator utama kinerja tata kelola pemerintahan.	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah atau Kementerian PANRB terhadap penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam satu tahun anggaran.	Skor hasil evaluasi SAKIP OPD	Sekretariat	

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 6 Oktober 2025

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PADANG PANJANG



Nurasrizal ST, MT

Pembina Tk. I, IV/b. NIP. 19770829 2005011 004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang.

Nomor : 700.1.1.4/ /Tahun 2025

Tanggal : Oktober 2025

Tentang : Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2025--2029**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Peluang Investasi	Jumlah investor terdaftar(PMDN/PMA)	Pelaku usaha	Jumlah investor berkaitan dengan nilai Investasi sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat karena menentukan pertumbuhan pembangunan suatu daerah	Jumlah investor yang menanamkan modal di Kota Padang Panjang pada tahun berjalan	Jumlah Investor pada tahun berjalan	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET / KRITERIA
				ALASAN (Permasalahan yang akan diselesaikan)	DEFINISI OPERASIONAL	FORMULA/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Meningkatnya kinerja pelayanan Perizinan Terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan perizinan	Angka	Kualitas layanan perizinan merupakan faktor penting dalam meningkatkan kepuasan masyarakat dan iklim investasi. Masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara standar pelayanan perizinan dengan persepsi dan harapan masyarakat pengguna layanan. Oleh karena itu, diperlukan indikator yang mampu mengukur tingkat kepuasan masyarakat secara objektif sebagai dasar perbaikan kualitas pelayanan perizinan secara berkelanjutan.	Nilai indeks yang diperoleh dari hasil pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh DPMPTSP, berdasarkan persepsi responden terhadap unsur-unsur pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Hasil survei kepuasan masyarakat layanan perizinan	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
3	Meningkatnya kesempatan kerja	Persentase peningkatan serapan tenaga kerja	%	Tingkat serapan tenaga kerja merupakan indikator penting keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan. Masih terdapat kesenjangan antara jumlah pencari kerja	Persentase pertambahan jumlah tenaga kerja yang berhasil ditempatkan atau terserap di dunia kerja pada tahun berjalan	$\text{Persentase Peningkatan Serapan TK} = \frac{\text{Jumlah TK terserap tahun berjalan} - \text{Jumlah TK terserap tahun sebelumnya}}{\text{Jumlah TK terserap tahun sebelumnya}} \times 100\%$	Bidang Penanaman Modal dan Tenaga Kerja	